

Berita : Bantuan Desa Tak Kunjung Cair
 Entitas / Cakupan : Kabupaten Bandung Barat
 Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal.2
 Edisi : Rabu, 6 Desember 2017

Bantuan Desa Tak Kunjung Cair

NGAMPRAH, (PR).-

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum menyalurkan dana bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) tahun 2015 dan 2016 ke pemerintah desa senilai Rp 5,1 miliar. Selain itu, alokasi dana desa (ADD) tahun 2016 sebesar hampir Rp 225 juta juga belum disalurkan. Sampai saat ini, pemerintah desa tak mendapat kepastian mengenai penyalurannya.

"Sampai Desember ini juga masih banyak pemerintah desa di Bandung Barat yang belum bisa menyerap anggaran desa. Kondisi itu dapat berpengaruh dan cenderung mengganggu kinerja pemerintah desa mengingat pemerintah desa dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan

belanja desa (APBDes) dan pelaporannya terhambat oleh ketidakpastian pencairan bantuan, seperti ADD dan BHPR," kata seorang kepala desa yang juga pengurus Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung Barat yang enggan disebutkan namanya, Selasa (5/12/2017). Dia khawatir, penyebutan nama semakin menghambat pencairan APBDes di desanya.

Padahal, kata dia, akhir Desember ini pemerintah desa sudah harus menyusun pelaporan realisasi APBDes tahun 2017. Oleh karena itu, dia berharap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat melakukan percepatan pencairan bantuan ini.

"Itu termasuk pagu BHPR tahun 2017. Sampai saat ini, informasi tentang tindak lanjut ADD juga tidak ada," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Penataan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat Rambey Solihin membenarkan belum cairnya dana tersebut. Meski begitu, dia meminta persoalan itu ditanyakan ke satuan kerja yang mengurus keuangan daerah, yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

"Belum, tapi sebaiknya ditanyakan ke BPKD yang lebih memahaminya. Soalnya, BHPR itu menunggu realisasi pajak dan retribusi daerah yang datanya ada di BPKD. Berapa besar nilainya juga menunggu rekapitulasi penerimaan pajak dan retribusi dari BPKD," katanya melalui pesan singkat.

APBD perubahan

Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran BPKD Bandung Barat Raden Ritta Dewi Puspita menuturkan, dana BHPR 2015 dan 2016 sebesar Rp 5,1 miliar sudah dianggarkan di APBD Perubahan Kabupaten Bandung Barat 2017.

Untuk pencairannya, dilakukan oleh BPKD melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah ada pengajuan dari dinas teknis, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

"Yang mengumpulkan persyaratannya ada di dinas teknis. Kalau sudah terkumpul, sudah ada pengajuan dan sudah ada surat keputusan bupati buat penetapannya, baru dicairkan. Jadi, BHPR itu sudah kami anggarkan di APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 5,1 miliar," ungkap Ritta.

Terkait ADD 2016, kata Ritta, pihaknya belum bisa memastikan besaran anggaran yang belum disalurkan ke pemerintah desa. Pasalnya, Dinas PMD juga belum mengajukan nilai kekurangannya.

"Belum dihitung ulang berapa kekurangannya. Untuk kekurangannya itu, kalau nanti ada pengajuan, kami akan upayakan di APBD 2018, setelah ada perhitungannya," tutur Ritta. **(Hendro Husodo)*****